

KOMPARTEMEN: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
Maret 2019, Volume XVII, No 1, 33-47

PENGARUH MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA

Dwi Sudaryati¹, Sucahyo Heriningsih²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta

ABSTRACT

The objective of this research was to find out the influence of motivation, organizational culture and village information systems on the performance of village government. This research is a quantitative research conducted in Banguntapan District, Bantul Regency. The data were collected by using questionnaires. Respondents in this research are village head and apparatus. The number of samples in this study is 32. The method of data analysis used is multiple linear regression. The results showed that the motivation and information system village does not affect the performance of village government, while organizational culture influence on performance of village government. This shows that the organizational culture that is formed and there is greatly affect the behavior of members of the organization in carrying out its duties and responsibilities. Good organizational culture will create good village government performance as well.

Keywords : *Village, Performance, Motivation, Organizational Culture, Information System.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharapkan pemerintah desa dapat mengatur urusan desanya dengan lebih baik dan mandiri. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2, bahwa pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur, membina dan memimpin desa agar dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah desa juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola segala anggaran desa dan juga haruslah ada pengawasan yang intens dalam menjalankan UU ini baik dari pemerintah daerah setempat dan juga dari masyarakat desa itu sendiri, agar penggunaan dana alokasi dapat teralokasikan dengan baik dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

UU Desa secara umum mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014). Kinerja merupakan

gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan suatu strategi organisasi. Keberhasilan suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam konteks entitas pemerintahan desa, aparatur desa menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Keberhasilan aparatur desa dalam mengerjakan perannya sesuai dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan persyaratan yang ada inilah yang selanjutnya disebut dengan kinerja. Dalam hal ini, kinerja pemerintah desa ditentukan oleh aparat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah desa sesuai UU Desa No.6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas pelayanan kepada masyarakat ini mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sesuai pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014, perangkat desa terdiri atas: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Oleh karena itu, para perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Kinerja perangkat desa pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, baik berasal dari internal individu yang terdiri atas latarbelakang, keahlian, kemampuan dan motivasi maupun berasal dari eksternal individu yang kerap disebut dengan faktor situasional. Faktor situasional mencakup kepemimpinan, lingkungan kerja, kompleksitas tugas, hubungan sosial atau rekan kerja, serta budaya dalam organisasi tersebut. Kekuatan pendorong dari dalam diri seseorang pada setiap aktivitas yang dilakukannya disebut motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi lebih baik, akan melaksanakan pekerjaan maupun tugasnya dengan baik pula. Dengan demikian, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan adalah motivasi. Namun motivasi juga ditentukan oleh adanya kesempatan untuk berkarier, jenis pekerjaan serta kebanggaan sebagai bagian dari organisasi, perasaan aman dalam bekerja, gaji yang adil, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja serta perlakuan yang adil dari pimpinan. Dengan adanya motivasi dapat menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan produktifitas seorang pegawai (Simamora, 2004).

Faktor penting lain yang mempengaruhi kinerja adalah budaya organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pegawai pemerintah yang baik pula. Sebelumnya pengaturan desa ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kedua UU ini tidak memberikan hak-hak yang khusus bagi desa untuk membangun dan mengatur sendiri roda pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak pada perubahan budaya organisasi yang mau tidak mau harus menghadapi serangkaian adaptasi yang harus dilakukan. Dengan diimplementasikannya UU Desa, desa dalam melaksanakan pembangunannya dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk menuju desa yang maju, mandiri, demokratis dan sejahtera.

Selain dipengaruhi oleh motivasi dan budaya organisasi, kinerja juga dapat ditentukan oleh sistem informasi desa. Menurut Pasal 86 ayat (2) UU Desa, bahwa sistem informasi desa berisi tentang data desa, data pembangunan desa, kawasan desa, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi tentang pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem informasi desa (SID) yakni informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Penerapan teknologi sistem informasi pada desa, hendaknya mempertimbangkan kemampuan pemakai sistem teknologi, sehingga teknologi sistem informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemakai. Diharapkan, aplikasi teknologi sistem informasi baru dapat meningkatkan kinerja individual yang akan berdampak ke kinerja organisasi. Manfaat sistem informasi desa bagi desa adalah untuk penguatan kualitas pelayanan publik desa, dengan adanya sistem informasi desa, data-data dan dokumen surat menyurat untuk pelayanan publik deasa akan lebih akurat dan cepat didapat, sehingga kualitas pelayanan publik desa meningkat. Menurut data website Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa 75 desa di Kabupaten Bantul telah memiliki website desa berbasis aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta.

Pratama (2014) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa penyediaan infrastruktur fisik berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan sebagai penunjang segala aktifitas dan perekonomian di desa. Kinerja yang baik serta peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdampak terhadap kelancaran proses pelaksanaan pembangunan. Atnila (2017) menyatakan bahwa kinerja pegawai kantor kelurahan Kawatuna ditentukan oleh motivasi ekstrinsik terdiri dari upah, kondisi kerja, keamanan kerja, status, prosedur organisasi, mutu penyelian dan mutu interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan dan bawahan dan motivasi intrinsik terdiri dari pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri dan kemungkinan berkembang maka semakin tinggi pula kinerja pegawai.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa tahun 2014, Kabupaten Bantul memiliki rata-rata tertinggi IPD di Provinsi D.I.Yogyakarta dengan nilai indeks sebesar 75,06. Jumlah desa di Kabupaten Bantul sebanyak 75 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 41 desa dan desa berkembang sebanyak 34 desa (Bappenas, 2014). Selain itu, Kabupaten Bantul memiliki nilai IDM sebesar 0,7617. Kecamatan Banguntapan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul dengan jumlah desa terbanyak yaitu 8 desa dengan 6 desa merupakan desa mandiri dan 2 desa merupakan desa maju.

Berdasarkan latarbelakang diatas serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur desa, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, 2). Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, dan 3). Apakah sistem informasi desa memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Kinerja pemerintah desa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, hal ini merupakan

bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh motivasi, budaya organisasi dan sistem informasi desa terhadap kinerja pemerintah desa.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja adalah hasil-hasil fungsi kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Fungsi kegiatan yang dimaksud yaitu pelaksanaan hasil kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Pelaksanaan hasil prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mahsun (2006), kinerja (performance) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Dengan demikian, kinerja dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja yang dapat berasal dari intern maupun ekstern.

Motivasi

Motivasi merupakan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja dilingkungan organisasinya. Anggota organisasi yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika anggota organisasi berpikir negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja tersebut meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. Motivasi dapat berasal dari dalam diri maupun luar diri seseorang, sebagai contoh motivasi intrinsik jika seseorang berhasil mencapai motivasinya, maka yang bersangkutan cenderung untuk terus termotivasi. Sebaliknya jika seseorang gagal mewujudkan motivasinya, maka yang bersangkutan mungkin tetap terus bekerja sampai motivasinya tercapai atau menjadi putus asa yang berakibat langsung kepada kinerja dari karyawan tersebut, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan faktor eksternal karyawan yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan (Atnila,2017).

Menurut Heliastuti (2016) bahwa pendekatan motivasi sangat diperlukan untuk menciptakan good governance di lingkungan birokrasi pemerintah desa. Hal ini digunakan sebagai instrumen yang baik untuk mendorong pemerintah desa dalam melaksanakan kerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Motivasi merupakan faktor pendorong dalam membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi kerja dapat ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melakukan kerja, prestasi yang dicapainya, pengembangan diri serta kemandirian dalam bertindak. Motivasi yang harus dimiliki oleh perangkat desa adalah sikap rasional, berlandaskan nilai, norma dan motivasi efektif. Motivasi ini menjadi modal utama penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, yang mempengaruhi sistem kerja birokratis sehingga mempunyai tingkat kinerja yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan hipotesis ke-1 yang diajukan:

H1 : Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pemerintah desa

Budaya Organisasi

Menurut Sobirin (2007) bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami serta dijiwai oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman anggota organisasi untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka bertingkah laku atau berperilaku.

Pembentukan budaya organisasi dimulai dari tahap pembentukan ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi. Meski pada tahap pembentukan ide organisasi tersebut belum menjadi kenyataan atau ada wujudnya secara fisik, tahap ini menjadi dasar terbentuknya budaya organisasi. Budaya organisasi baru menjadi kenyataan ketika sebuah organisasi sudah benar-benar berdiri. Dapat dikatakan bahwa ketika organisasi berdiri, pembentukan budaya organisasi pun ikut dimulai.

Budaya organisasi sebagai pedoman untuk mengontrol perilaku anggota organisasi, pasti memiliki fungsi dan manfaat bagi organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, manajemen perlu memahami berbagai esensi budaya organisasi. Menurut Riani (2011), budaya organisasi berfungsi:

1. Memberi sense of identity kepada anggota organisasi untuk memahami visi, misi, dan menjadi bagian integral dari organisasi.
2. Menghasilkan dan meningkatkan komitmen terhadap misi organisasi.
3. Memberikan arah dan memperkuat standar perilaku untuk mengendalikan perilaku organisasi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Widiasari dan Putri (2018) menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Badung. Semakin baik budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Badung. Rahardjo (2016) dan Kusumah (2015) juga menemukan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan hipotesis ke-2 yang diajukan:

H2 : Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah desa.

Sistem Informasi Desa

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif, maka pemerintah desa perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang di kenal dengan sistem informasi desa (SID). SID dapat lebih memudahkan pencapaian kinerja pemerintah desa yang akuntabel dan transparan. Pemerintah desa perlu mengembangkan SID yang sesuai dengan visi UU Desa, agar terwujud desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis, sehingga SID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan pemerintah desa. Sesuai UU Desa pasal 86 ayat (2) dengan adanya SID, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

SID meliputi data desa, data pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan. Dalam penerapannya SID dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Berikut ini peran dan manfaat sistem informasi desa:

1. Pemerintah desa lebih efisien
Pemerintahan desa dapat menyediakan layanan pada warga lebih cepat dibandingkan cara manual yaitu dengan memaksimalkan pemakaian Sistem Informasi Desa, sebab data penduduk desa sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis.
2. Pemerintah desa lebih efektif
Program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan menggunakan sistem informasi desa, karena pemerintah desa dapat dengan mudah mengidentifikasi data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan. Dengan adanya SID penentuan program desa tidak berdasarkan perkiraan namun didasarkan pada basis data yang lengkap.
3. Pemerintah desa lebih transparan
Pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat desa. Sistem informasi desa juga dapat digunakan untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa, dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di website desa, baliho ataupun papan pengumuman desa.
4. Pemerintah desa lebih akuntabel
Pemerintah desa akan lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, dan penggunaan dana desa karena data sudah tersimpan dengan lengkap melalui SID.
5. Layanan publik lebih baik
Pemerintah desa juga lebih efisien dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Misalnya waktu untuk memperoleh surat keterangan dari Desa menjadi secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.
6. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa
Sistem informasi desa meliputi informasi kependudukan, perencanaan, asset, maupun anggaran yang akan tersimpan secara elektronik di website desa. Hal ini akan lebih mudah diakses oleh masyarakat desa.
7. Masyarakat desa dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa.
Dengan ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses, maka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, SID juga memiliki potensi untuk menyediakan media dalam menggalang partisipasi warga, sehingga semua masyarakat desa akan mengetahui semua kegiatan desa yang sedang berjalan dan yang direncanakan, dan masyarakat desa dapat ikut berpartisipasi dalam mengawal kegiatan desa untuk memberikan saran dan masukan terkait pembangunan desa.

Sulina,dkk (2017) membuktikan bahwa (1) Penginputan data pada sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; (2) Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; (3) Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. maka penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-

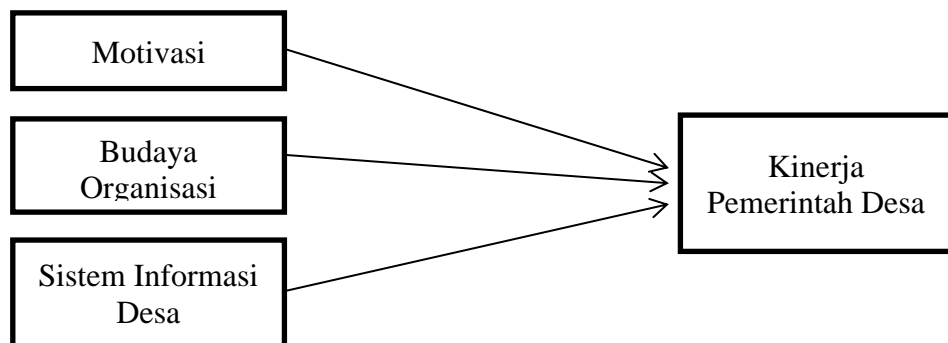
kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.

Pemerintah desa penting untuk dapat menerapkan sistem informasi (SID) agar masyarakat desa dapat mengakses dan memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, dan dapat ikut serta dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan hipotesis ke-3 yang diajukan:

H3 : Terdapat pengaruh penerapan sistem informasi desa terhadap kinerja pemerintah desa.

Motivasi, Budaya Organisasi, Sistem Informasi Desa dan Kinerja Pemerintah Desa

Pencapaian kinerja yang efektif diperlukan suatu kesadaran individu aparatur pemerintah dengan disiplin kerja yang baik. Manajemen mempunyai peran penting dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi sektor publik, namun kemampuan manajemen semata tidaklah cukup menjadikan kinerjanya baik. Motivasi, budaya organisasi dan sistem informasi desa merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Motivasi merupakan pendorong dalam membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu pekerjaan yang merupakan upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi sebagai modal utama penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, sehingga pemerintah akan mempunyai tingkat kinerja yang tinggi. Budaya organisasi sangat penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi. Oleh karena itu, kinerja organisasi sangat tergantung pada perilaku anggota yang terdapat dalam organisasi tersebut. SID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan pemerintah desa agar terwujud desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis sehingga untuk lebih memudahkan pencapaian kinerja yang akuntabel dan transparan..



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan di desa-desa se-Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY yang terdiri atas desa Baturetno, Jagalan, Ponoroto, Tamanan, Banguntapan, Jambidan, Wirokerten dan Singosaren. Responden pada penelitian ini adalah semua perangkat desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, yang dipilih dengan menggunakan teknik non-

probability sampling dengan purpose sampling. Jumlah responden penelitian sebanyak 32 responden. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), dengan skala interval.

Kinerja pemerintah desa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, hal ini merupakan bentuk sebuah pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah desa, mengenai bentuk pelayanan yang diberikan terdapat pelayanan administrasi dan non administrasi. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa merupakan variabel dependen dengan indikator kualitas output, kuantitas output, jangka waktu output, waktu penyelesaian pekerjaan di tempat kerja, dan kemampuan bekerja sama (Sudaryati, 2017).

Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Motivasi dapat menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat serta pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Dengan adanya motivasi, pegawai akan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang ada dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, serta dilakukan dengan perasaan senang dan tanpa tekanan. Motivasi dapat berasal dari dalam maupun luar individu. Motivasi (variabel independen) diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), dengan skala interval.

Menurut Bateman & Snell (2007) budaya organisasi adalah himpunan asumsi penting tentang organisasi dan tujuan-tujuannya dan tentang bagaimana cara mereka berbagi nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Menurut Cameron dan Quinn (2006) budaya organisasional dapat dibagi menjadi empat bagian menurut tipologinya, yaitu: (1) clan culture adalah organisasi yang merupakan tempat paling bersahabat untuk bekerja. Clan culture menempatkan kerja tim, keterlibatan anggota, dan konsensus pada prioritas tertinggi. (2) adhocracy culture adalah organisasi yang merupakan tempat bekerja yang dinamis. Budaya Organisasi (variabel independen) diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), dengan skala interval.

Sistem informasi desa (SID) membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif, serta untuk lebih memudahkan pencapaian kinerja yang akuntabel dan transparan, agar terwujud desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. SID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan pemerintah desa. Sesuai UU Desa pasal 86 dengan adanya SID, maka indikator SID dalam penelitian ini meliputi: fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Variabel ini diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Analisis data dilakukan secara berurutan mulai dari uji kualitas data, analisis diskriptif, analisis regresi sederhana, analisis regresi dengan variabel moderating, dan pengujian hipotesis. Pengujian kualitas data dilakukan dengan alat statistik berupa nilai korelasi antara masing-masing butir pertanyaan terhadap total score masing-masing butir pertanyaan per variabelnya, dengan melihat score correlation pearson dan nilai signifikansi untuk uji validitas, dan uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistic Cronbach Alpha.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$K = \beta_0 + \beta_1MO + \beta_2BO + \beta_3SID + e$$

Keterangan :

K	=	Kinerja Pemerintah Desa
MO	=	Motivasi
BO	=	Budaya Organisasi
SID	=	Sistem Informasi Desa

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase
Masa kerja	kurang dari < 5 th	12	37,50
	5-10 tahun	7	21,88
	11-14 tahun	7	21,88
	lebih dari > 15 tahun	6	18,75
Usia	kuran dari 30 tahun	4	12,50
	30-39 tahun	8	25,00
	40-49 tahun	15	46,90
	lebih dari 50 tahun	5	15,63
Jenis Kelamin	Laki-laki	26	81,20
	Perempuan	6	18,80
Pendidikan	SMA	10	31,25
	D3	5	15,63
	S1	16	50,00
	S2	1	3,13

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik responden (tabel 1), hasil secara statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa telah bekerja kurang dari 5 tahun dengan jumlah presentase 37,5%. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa di atas 50% berjenis kelamin pria dengan jumlah presentase sampai 81,2% dari keseluruhan responden penelitian atau sebesar 26 orang dan sisanya 6 orang berjenis kelamin wanita.

Tabel 1 menunjukkan bahwa deskripsi responden terkait dengan usia perangkat desa. sebagian besar responden berusia antara 40 sampai dengan 49 tahun yang mencapai prosentase 46,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan prosentase terendah perangkat desa yang menjadi responden berusia di bawah 30 tahun. Berdasarkan data laterbelakang pendidikan responden sebagian besar sarjana dengan capaian presentase tertinggi 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di pemerintah desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul sudah bagus karena lebih dari 50% sudah berpendidikan minimal diploma.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	<i>Coefficient Pearson Correlation</i>	Kesimpulan	Variabel	<i>Coefficient Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
Kinerja Pemerintah Desa	0.000	Valid	Budaya organisasi		
Pernyataan1	0.000	Valid	Pernyataan1	0.000	Valid
Pernyataan2	0.000	Valid	Pernyataan2	0.000	Valid
Pernyataan3	0.002	Valid	Pernyataan3	0.000	Valid
Pernyataan4	0.000	Valid	Pernyataan4	0.000	Valid
Pernyataan5	0.000	Valid			
Pernyataan6	0.000	Valid			
Pernyataan7	0.000	Valid			
Pernyataan8	0.000	Valid			
Pernyataan9	0.000	Valid			
Pernyataan10					
Motivasi			Sistem Informasi Desa		
Pernyataan1	0.006	Valid	Pernyataan1	0.000	Valid
Pernyataan2	0.002	Valid	Pernyataan2	0.000	Valid
Pernyataan3	0.003	Valid	Pernyataan3	0.000	Valid
Pernyataan4	0.000	Valid	Pernyataan4	0.000	Valid
Pernyataan5	0.000	Valid	Pernyataan5	0.000	Valid
Pernyataan6	0.002	Valid	Pernyataan6	0.000	Valid
Pernyataan7	0.000	Valid			
Pernyataan8	0.000	Valid			
Pernyataan9	0.000	Valid			

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Kinerja Pemerintah Desa	0,963	Reliabel
Motivasi	0,887	Reliabel
Budaya Organisasi	0,793	Reliabel
Sistem Informasi Desa	0,854	Reliabel

Pengujian kualitas data dilakukan dengan alat statistik berupa nilai korelasi antara masing-masing butir pertanyaan terhadap total score masing-masing butir pertanyaan per variabelnya, dengan melihat score pearson correlation dan nilai signifikansi untuk uji validitas, dan uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistic Cronbach Alpha. Hasil pengujian validitas atas butir-butir pertanyaan disetiap variabel penelitian menunjukkan korelasi variabel antara masing-masing score butir pertanyaan terhadap total score butir-butir pertanyaan menunjukkan hasil yang signifikan yaitu coefficient pearson correlationnya lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan dari variabel adalah valid karena masing-masing butir pertanyaan memang mengukur instrument yang diukur (Tabel 2).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner di katakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama tentang variabel yang diuji. Pengujian reliabilitas menggunakan uji statistic Cronbach Alpha, dengan variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha >

0,60. Hasil pengujian reliabilitas untuk semua butir-butir pertanyaan masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha terletak di antara 0,793 sampai dengan 0,963 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang terdiri dari motivasi, budaya organisasi, sistem informasi desa dan kinerja pemerintah desa bersifat reliabel atau konsisten dalam pengambilan sampel (Tabel 3).

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KINERJA	32	2.60	4.00	3.3063	0.45716
MOTIVASI	32	2.67	4.00	3.2217	0.40578
BUDAYA ORGANISASI	32	1.75	4.00	3.4688	0.46986
SID	32	2.67	4.00	3.3125	0.40989
Valid N (listwise)	32				

Deskripsi dari statistik variabel penelitian ditujukan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden yang menunjukkan rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian meliputi variabel motivasi, budaya organisasi, sistem informasi desa dan kinerja pemerintah desa. Statistik deskriptif lengkap dapat dilihat pada tabel 4 (lampiran).

Tabel 4 merupakan deskripsi setiap variabel yang dianalisis. Variabel kinerja (K), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 10, dan jumlah data 32 (n=32), diperoleh rata-rata 3,30. Berarti bahwa responden menjawab pertanyaan dengan pendapat setuju. Variabel motivasi (MO), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 9, dan jumlah data 32(n=32), diperoleh rata-rata 3,22. Berarti dapat dikatakan bahwa responden mempunyai persepsi mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja pemerintah desa adalah cukup karena jarak mean tidak lebih dekat ke nilai minimum ataupun lebih dekat ke nilai maximum. Variabel Budaya Organisasi (BO), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 4, dan jumlah data 32(n=32), diperoleh rata-rata 3,46. Berarti dapat dikatakan bahwa responden mempunyai persepsi mengenai budaya organisasi yang diimplementasikan juga cukup. Variabel Sistem Informasi Desa (SID), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 6, dan jumlah data 32(n=32), diperoleh rata-rata 3,31. Berarti dapat dikatakan bahwa responden setuju mengenai Sistem Informasi Desa yang diimplementasikan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.620	0.385	0.319	0.37723

Tabel 6. Hasil Uji f

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.494	3	.831	5.843	.003 ^a
Residual	3.984	28	.142		
Total	6.479	31			

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.687	0.678		1.013	0.320
MOTIVASI	0.368	0.229	0.326	1.608	0.119
BUDAYA ORGS	0.381	0.158	0.392	2.406	0.023
SID	0.034	0.213	0.031	0.160	0.874

Hasil uji f menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa model yang digunakan adalah layak. Hal ini berarti bahwa variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa pengaruh motivasi, budaya organisasi, sistem informasi desa terhadap kinerja pemerintah desa adalah sebesar 31,9%, sedangkan 68,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel Motivasi sebesar 0,119 lebih besar dari 5% yang berarti motivasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga tidak mendukung hipotesis H1. Menurut Atnila (2017), pegawai dengan motivasi kerja yang tinggi akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah pegawai tidak mempunyai semangat bekerja, motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Perangkat desa yang ada di Kecamatan Banguntapan mayoritas memiliki latarbelakang pendidikan sarjana, sehingga perangkat desa sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel budaya organisasi sebesar 0,023 lebih kecil dari 5% yang berarti budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga mendukung hipotesis H2. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pegawai pemerintah yang baik pula. Pengaturan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak pada perubahan budaya organisasi yang mau tidak mau harus menghadapi serangkaian adaptasi yang harus dilakukan. Dengan diimplementasikannya UU Desa ini, desa dalam melaksanakan

pembangunannya dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk menuju desa yang maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Data menunjukkan bahwa masih ada 2 desa (Singosaren dan Jambidan), budaya organisasi yang baik dapat mendukung untuk menuju desa mandiri seperti 6 desa lainnya (Banguntapan, Jagalan, Wirokerten, Potorono, Tamanan, Baturetno).

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel sistem informasi desa sebesar 0.874 lebih besar dari 5% yang berarti sistem informasi desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga tidak mendukung hipotesis H3. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu pengelolaan manajemen sistem informasi desa yang lebih konsisten dan selalu update informasi. Dengan demikian, adanya sistem informasi desa perlu didukung oleh pelaksanaan tatakelola (good governance) di desa yang baik. Prinsip tatakelola informasi desa juga tercakup dalam pengaturan tentang kewenangan desa, hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan pemantauan/pengawasan pembangunan desa. Pengelolaan sistem informasi desa diperlukan agar prinsip kebermanfaatan SID dapat mendukung kinerja pemerintah desa, antara lain: prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Kelima prinsip manfaat SID tersebut dapat memperkuat kapasitas desa dalam pelayanan publik, keterbukaan informasi dan pembangunan di tingkat desa, serta membantu dalam perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, dan pengelolaan sumber daya desa secara mandiri. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Niswantariputri (2017).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan sistem informasi desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi menentukan perilaku perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Perilaku perangkat desa yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik mencerminkan kinerja pemerintah desa yang baik. Kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, hal ini merupakan bentuk sebuah pengabdian yang dilakukan oleh pemerintahan Desa, mengenai bentuk pelayanan yang diberikan terdapat pelayanan administrasi dan non administrasi. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Budaya organisasi harus dilaksanakan dan dijaga agar terwujud kekompakan kerja sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan dan layanan yang prima. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa, seperti lingkungan kerja. Pemerintah desa sangat perlu memperhatikan lingkungan kerja yang aman, nyaman sehingga dapat meningkatkan hubungan dengan rekan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. Seluruh Desa di Kabupaten Bantul Miliki Website Desa berbasis SID. Tersedia di <http://lumbungkomunitas.net/2015/06/seluruh-desa-di-kabupaten-bantul-miliki-website-desa-berbasis-sid/>

- Ariyanto,D. 2008. Pengaruh Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 2008 - ojs.unud.ac.id
- Heriningsih, Sucahyo. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, 18(2).
- Heriningsih, Sucahyo. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. Prosiding The 1st URECOL University Research Colloquium. LPPM UMS. Surakarta.
- Kusumah, Evi Teja dan Suharnomo. 2015. Analisis Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi pada Karyawan PT. Temprina Media Grafika Semarang). *E-Jurnal Manajemen Universitas Diponegoro*, 4(3), hal.1-15.
- Paramitha, Linda Muchacha; Tjahjanulin Domai dan Suwondo. 2013. Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa. *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal 91-100
- Pratama,Angga Amda. 2014. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2, No. 5.
- Rahardjo, Edy.2016. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada PT. LG Bagian Penjualan IndonesiaSemarang). *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi Universitas Diponegoro*, 13, hal.98-109.
- Riskawati, Tri Handayani Amaliah, Amir Lukum.2016. Analysis of Local Government Performance In Managing Distribution og Village Funds. Journal of Accounting and Business Education*, 1 (1), September 2016.
- Rokhayati dan Astuti. 2015. Pengukuran Kinerja Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas Dengan Spiritual Leadership.*Jurnal Probisnis Vol 8 No. 2 Agustus 2015. ISSN : 1979 – 9268 e-ISSN : 2442 –4536*
- Sudaryati, Dwi., & Ratna Hindria, DPS. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Pemerintah kabupaten Sleman), Prosiding Kemenristek Dikti RI, UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Suharto and Abdul Rivai.2017. Analysis The Effect of Competence and Organization Culture to Motivation and Performance at UrbanVillage in Bekasi. *International Journalof Current Advanced Research*. ISSN: O:2319-6475, P: 2319-6505. Vol. 6 Issue 6 June 2017 pp 4235-4243
- Sulistyowati, Fadjarini dan Candra Rusmala Dibyarin. 2013.Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2013, hlm. 579-587
- Suwandi, Ari Warokka.(2013). Fiscal decentralization and special local autonomy: evidence from an emerging market. *Journal of Southeast Asian Research*. Vol. 2013 (2013). IBIMA Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiasari dan Putri. 2018. Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.2.*

Februari (2018): 1308-1334 ISSN: 2302-8556 DOI:
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p18>

Yunita, A. and Christianingrum. 2018. Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics (IJBE)* Vol.2 No.1. e-ISSN: 2549-3280